

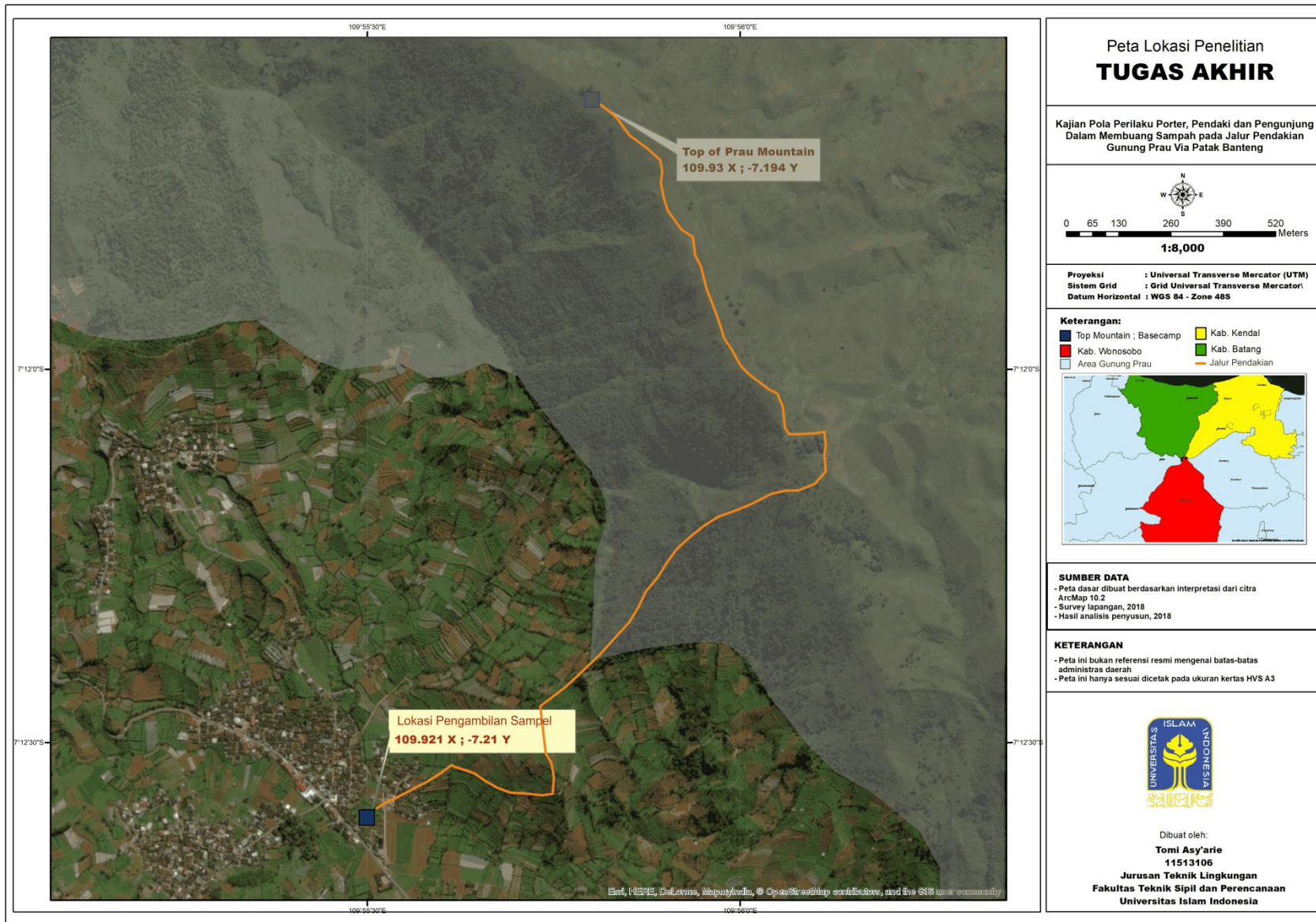
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Kawasan Hutan Lindung Gunung Prau merupakan kawasan dengan status konservasi. Status Kawasan Gunung Prau sebagai Kawasan Hutan Lindung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 - 2031. Kawasan Hutan Lindung Gunung Prau terletak di Provinsi Jawa Tengah.

Gunung Prau dengan keindahan pemandangan dari puncaknya diketinggian 2565 Mdpl, kita dapat melihat beberapa gunung yang ada di Jawa Tengah seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu dll. Selain dapat melihat beberapa gunung yang ada di Jawa Tengah kita juga dapat melihat pemandangan ladang atau perkebunan masyarakat Kecamatan Kejajar yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 42.665 jiwa yang mana sebagian besar penduduk Kecamatan Kejajar bermata pencaharian sebagai petani atau berkebun yang menanam tanaman hortikultura seperti kentang, wortel dll. Hamparan lahan pertanian atau perkebunan yang membentang rapi dikaki Gunung Prau ini menjadi sangat indah ketika dilihat dari puncak Gunung Prau. Selain keindahan alamnya Gunung Prau juga memiliki keaneka ragaman flora dan fauna termasuk flora dan fauna endemik Jawa Tengah seperti *Nisaetus bartelsi* (elang jawa), kantong semar dan bunga daisy.



Gambar 2.1. Peta Lokasi Penelitian

Puncak Gunung Prau terletak pada koordinat 7°11'13"LU 109°55'22"BT merupakan puncak tertinggi di kawasan Dataran Tinggi Dieng dengan padang rumput luas yang memanjang dari barat ke timur. Bukit-bukit kecil dan sabana dengan sedikit peopohon disekitar puncak. Kawasan Hutan Lindung Gunung Prau merupakan hutan hujan tropis yang memanjang meliputi 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Kendal. Di setiap kabupaten terdapat jalur-jalur pendakian, sedangkan pada pada penelitian ini yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah jalur pendakian Gunung Prau via Patak Banteng yang berada di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Lokasi penelitian tersaji pada **Gambar 2.1**.

2.2. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian sebelumnya banyak penelitian yang dilakukan mengenai kajian pola pola perilaku dan kondisi pesampahan pada suatu kawasan atau wilayah.

Tabel 2.1. Perbandingan Rencana Penelitian

No	Penelitian	Tujuan Utama	Metode	Hasil
1	Zamzami, 2002 Peran serta penduduk dalam pengelolaan sampah (studi kasus di Kota Bengkulu)	Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya peran serta penduduk dalam pengelolaan sampah.	- Dokumentasi. - Wawancara.	1. Terbatasnya kewenangan kepada Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Keindahan Kota menyebabkan rendahnya kegiatan penanganan sampah. 2. Terbatasnya sumberdaya dan faktor lingkungan yang kurang mendukung dalam pengelolaan sampah.
2	Tommy, M. 2004 Kajian perilaku membuang sampah dilingkungan Kecamatan Sangata, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.	a. Mengetahui tingkat perilaku penduduk Kecamatan Sangata dalam membuang sampah berdasarkan tingkat kepadatan penduduk.		

Lanjutan Tabel 2.1.

No	Penelitian	Tujuan Utama	Metode	Hasil
		<p>b. Mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku penduduk Kecamatan Sangata dalam membuang sampah.</p>		
3	<p>Syakur, M. 2017 Kajian kerusakan lingkungan akibat perilaku pembuangan sampah serta pengaruhnya terhadap kelestarian fungsi Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat.</p>	<p>a. Mengkaji persebaran dan kondisi persampahan meliputi jenis sampah, timbulan sampah dan volume sampah di jalur pendakian Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.</p> <p>b. Mengkaji pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat lokal dan pemerintah daerah di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.</p> <p>c. Merumuskan strategi penanganan permasalahan sampah di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.</p>	<p>- Studi Lapangan</p> <p>- Wawancara</p>	<p>Kerusakan lingkungan dikawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah timbulan sampah, keragaman flora dan fauna di Taman Nasional Gunung Rinjani serta perilaku masyarakat dan pengunjung dalam membuang sampah di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.</p>

Lanjutan Tabel 2.1.

No	Penelitian	Tujuan Utama	Metode	Hasil
4	Iskandar,D. 2009 Kajian lingkungan kultural terhadap persepsi, sikap dan perilaku penduduk dalam membuang sampah di Kecamatan Rengat.	a. Mengkaji respon penduduk yang dicerminkan dalam bentuk persepsi, sikap, dan perilaku dalam membuang sampah. b. Mengkaji system pembuangan sampah mulai dari sampah rumah tangga, dan TPA berdsarkan kondisi pemukiman. c. Mengkaji bagaimana strategi pengelolaan lingkungan kultural agar persepsi, sikap, dan perilaku dalam membuang sampah lebih baik dari sebelumnya.	- Wawancara - Studi Lapangan	1.

Dari **Tabel 2.1.** terdapat penelitian yang temanya serupa dengan yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat objek, subjek dan tempat penelitian yang berbeda penelitian ini pantas untuk dilaksanakan.

2.2.1. Permasalahan Sampah

Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Azwar (1990) mengatakan yang dimaksud dengan sampah adalah sebagian dari sesuatu yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk

kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk kedalamnya. Manik (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil dari kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut ini.

- a) Adanya sesuatu benda atau bahan padat
- b) Adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan manusia;
dan
- c) Benda atau bahan tersebut tidak terpakai lagi (Notoatmojo, 2003)

2.2.2. Timbulan Sampah

Timbulan Sampah Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah diwilayah tertentu persatuan waktu (Dinas PU, 2007). Timbulan sampah sangat diperlukan untuk menentukan dan mendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi sampah, fasilitas *recovery* material, dan fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Menurut SNI 19-14 3964-1995, bila pengamatan lapangan belum tersedia, maka untuk menghitung besaran sistem, dapat digunakan angka timbulan sampah sebagai berikut:

1. Satuan timbulan sampah kota sedang 2,75-3,25 L/orang/hari atau 0,070-0,080 kg/orang/hari; dan
2. Satuan Timbulan sampah kota kecil = 2,5-2,75 L/orang/hari atau 0,625-0,70 kg/orang/hari.

Keterangan : Untuk kota sedang jumlah penduduknya $100.000 < p < 100.000$.
Prakiraan timbulan sampah baik untuk saat sekarang maupun dimasa

mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan dan pengkajian sistem pengelolaan persampahan.

Prakiraan timbulan sampah merupakan langkah awal yang biasa dilakukan dalam pengelolaan persampahan. Satuan timbulan sampah biasanya dinyatakan sebagai satuan skala kuantitas perorang atau perunit bangunan dan sebagainya. Rata-rata timbulan sampah tidak akan sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, atau suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (Damanhuri dan Padmi, 2004):

1. Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya;
2. Tingkat hidup;
3. Perbedaan musim;
4. Cara hidup dan mbilisasi;
5. Iklim;
6. Cara penanganan makannya.

2.2.3. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia yang harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam.

Menurut Yolarita (2011), paradigma baru dalam pengelolaan sampah lebih menekankan pada pengurangan sampah dari sumber untuk mengurangi jumlah timbulan sampah serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah. Maka dari itu, prinsip 3R sejalan dengan pengelolaan sampah yang menitikberatkan pada pengurangan sampah dari sumbernya. Departemen Pekerjaan Umum (2007) menjelaskan bahwa prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Prinsip pertama adalah *reduce* atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah;
- b) Prinsip kedua adalah *reuse* yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain.
- c) Prinsip ke tiga adalah *recycle* yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos.

Dari beberapa pengertian diatas yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Pengelolaan sampah yang dimaksud pada penelitian ini adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan pada tingkat rumah tangga, berupa pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan

sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong.

2.2.4. Perilaku Masyarakat dalam Mengelola Sampah

Dalam konteks pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dapat berupa pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik dalam proses pewadahan, atau melalui pembuatan kompos dalam skala keluarga dan mengurangi penggunaan barang yang tidak mudah terurai (Yolarita, 2011). Chandra (2012) mengungkapkan bahwa konsep partisipasi dapat diukur melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan. Bila dikaitkan dengan pengelolaan sampah, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari ikut sertanya masyarakat dalam proses pelaksanaan mengelola sampah, tetapi juga ikut serta menjadi anggota organisasi yang berkaitan dengan masalah sampah yang berperan dalam merencanakan sistem pengelolaan sampah yang baik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berupa partisipasi secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan partisipasi tidak langsung ini adalah keterlibatan masyarakat dalam masalah keuangan, yaitu partisipasi pengelolaan sampah dengan cara melakukan pembayaran retribusi pelayanan sampah melalui dinas terkait secara langsung memberikan pelayanan dalam kebersihan.

Dalam penelitian Manurung (2008), salah satu bentuk partisipasi terhadap pengelolaan sampah juga dapat dilihat dari kesediaan membayar (*willingness to pay*) untuk peningkatan fasilitas pengelolaan sampah agar kebersihan dan kualitas lingkungan tetap terjaga. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya mengelola sampah menjadi suatu benda lain yang memiliki manfaat. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, baik dalam bentuk sumbangan tenaga, ide, pikiran, maupun materi. Partisipasi merupakan modal yang penting bagi program pengelolaan sampah untuk

dapat berhasil mengatasi permasalahan mengenai sampah rumah tangga yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat, terutama di perkotaan.

Partisipasi masyarakat dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu partisipasi secara langsung dan partisipasi secara tidak langsung. Partisipasi secara langsung berupa pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Partisipasi secara tidak langsung dapat berupa pembayaran retribusi sampah, mengikuti penyuluhan/pelatihan mengenai pengelolaan sampah, dan pemberian saran/kritik kepada RT/RW terkait sistem pengelolaan sampah masyarakat (Yuliasuti dkk, 2013).

Partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak terlepas dari karakteristik individu maupun pengaruh dari lingkungan eksternal individu. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam partisipasinya terhadap pengelolaan sampah, di antaranya sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dkk. (2010) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai pengelolaan sampah, maka akan semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan di tempat mereka tinggal.

2. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai pengelolaan sampah merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Berdasarkan hasil penelitian Riswan dkk. (2011), pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah akan menentukan

tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah untuk menjaga kebersihan lingkungannya

3. Persepsi

Persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan bersih berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2005) menunjukkan bahwa semakin baik persepsi ibu-ibu rumah tangga terhadap kebersihan lingkungan, maka semakin baik partisipasi mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penelitian Manurung (2008) juga menunjukkan hasil yang sama, siswa yang memiliki persepsi bahwa lingkungan bersih merupakan hal yang penting akan cenderung berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Hapsari (2012) mengenai persepsi dan partisipasi menunjukkan bahwa persepsi memiliki hubungan langsung dengan tingkat partisipasi masyarakat

4. Pendapatan

Pendapatan berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara tidak langsung dalam pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah memerlukan biaya operasional, seperti contohnya dalam pengangkutan sampah menuju TPA untuk diolah. Begitu pula dengan pelayanan lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Biaya operasional tersebut diperoleh dari pembayaran retribusi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian Yuliastusi dkk. (2011) menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan masyarakat berpengaruh pada tingkat partisipasinya terhadap pengelolaan sampah.

5. Peran Pemerintah / Tokoh Masyarakat

Peran pemerintah ataupun tokoh masyarakat berkaitan dengan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah. Sosialisasi ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah

sebaiknya dilakukan oleh setiap individu agar masalah mengenai sampah dapat diatasi mulai dari akarnya, yaitu sumber penghasil sampah. Selain itu, peran pemerintah/tokoh masyarakat juga berkaitan dengan pengawasan tindakan pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dkk. (2010) membuktikan bahwa peran serta pemerintah daerah mempunyai hubungan yang kuat dengan pengelolaan sampah di Kota Tembilahan. Selain itu, penelitian Yolarita (2011) juga menunjukkan bahwa tokoh masyarakat juga berperan dalam memberikan informasi dan motivasi dalam menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan fasilitas yang ada yang berguna untuk membantu proses pengelolaan sampah. Contohnya adalah tong sampah yang memisahkan sampah organik dan sampah nonorganik ataupun fasilitas pengangkutan sampah rutin oleh petugas. Penelitian yang dilakukan oleh Yolarita (2011) menunjukkan bahwa minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor yang membuat partisipasi masyarakat kurang.

Di antara berbagai faktor yang telah dijelaskan, penelitian ini memusatkan perhatian pada faktor persepsi dan perilaku. Masih terdapat keraguan pada faktor tersebut karena penelitian yang dilakukan oleh Budiman dkk. (2013) menunjukkan bahwa persepsi bukan merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat membuktikan hal tersebut. Pada dasarnya dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, individu sangat dipengaruhi oleh kondisi dari individu tersebut sebagai subjek yang akan melakukan kegiatan. Kondisi tersebut terdiri dari kondisi fisiologis (keadaan fisik, panca indera, kesehatan) dan

kondisi psikologis, di mana persepsi memainkan peranan penting dalam menentukan kondisi psikologis (Sunaryo, 2004). Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa partisipasi akan sulit tercipta ketika kondisi psikologis individu dalam hal ini persepsinya terhadap suatu kegiatan tidak dalam kondisi yang baik. Persepsi menjadi sesuatu yang melandasi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Faktor-faktor internal maupun eksternal individu akan terlebih dahulu mempengaruhi persepsi, sebelum akhirnya memunculkan partisipasi terhadap suatu kegiatan. Dengan begitu, faktor internal dan eksternal individu berhubungan secara langsung.